



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2023-2026**

**DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PEMRINTAH KABUPATEN SORONG
2024**

KATA PENGANTAR

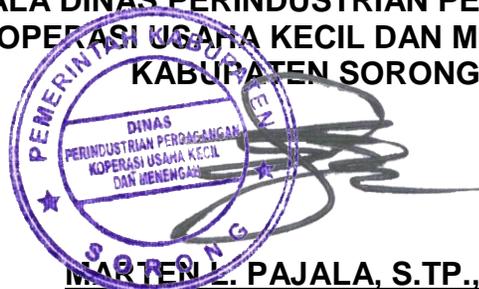
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong Tahun 2023 - 2026 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra ini disusun berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorong Tahun 2023 – 2026, bersifat indikatif dan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong.

Dokumen RENSTRA Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong Tahun 2023 – 2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian Tujuan, Sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan serta implementasinya dalam rencana Program dan Kegiatan.

Aimas, Januari 2024

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SORONG**



MARTEN L. PAJALA, S.TP.,M.Si
NIP. 19691212 199803 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Berlakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistem Matika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	7
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	10
BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS	11
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	11
3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)	11
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis	13
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	14
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	15
BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...	16
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	30
BAB VII PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (7) dan pasal 7 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra. Rancangan Renstra 2017-2022 SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sorong yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong sesuai Peraturan Bupati Sorong Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renstra SKPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman dan panduan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya dalam jangka waktu 4 (empat) tahun pada masa kepemimpinan Pj. Kepala Daerah.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 yang mengamanatkan bahwa Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023 - 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 - 2026 dan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan

Keuangan Daerah. Maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus segera menyusun rancangan akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis OPD yang merupakan penjabaran dari

Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 tahun berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM sehingga Rancangan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai dalam empat tahun ke depan, langkah langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong.

Rancangan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan dalam menjalankan tugas pokok fungsinya melaksanakan urusan Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sorong dalam jangka waktu empat tahun ke depan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rancangan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kabupaten Sorong adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong Tahun 2023 – 2026 adalah untuk menentukan arah

dalam menetapkan strategi dan kebijakan bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong serta merumuskan program bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sorong selama 4 tahun kedepan sesuai dengan arah Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorong 2023 - 2026.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan dan acuan awal (tolak ukur) dalam melakukan pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat selama 4 (empat) tahun;
- b. Tersedianya dokumen Perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan menentukan arah kegiatan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun;
- c. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

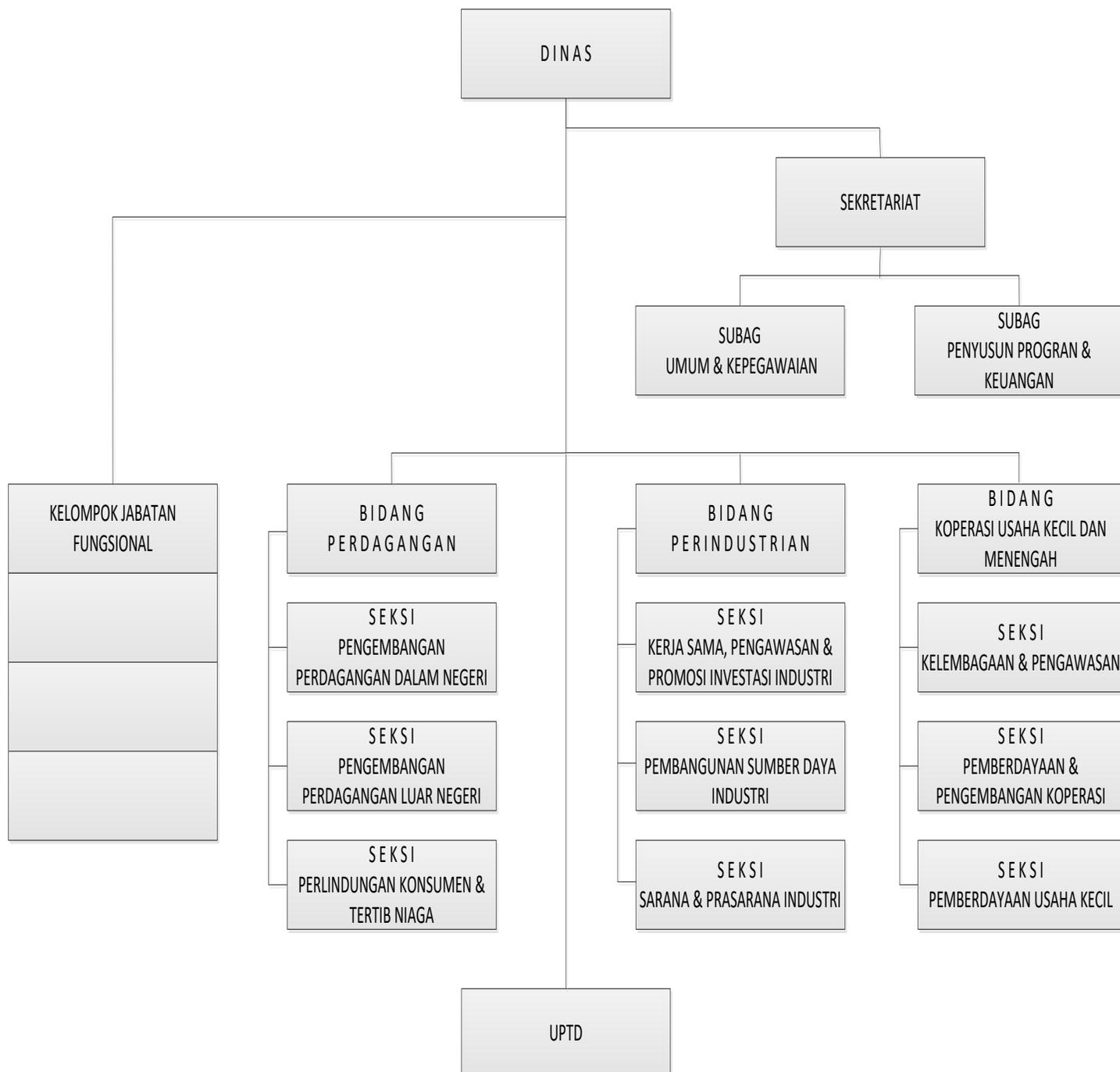
Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pembinaan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis dinas; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut gambaran struktur organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 31 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sorong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Sorong Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sorong;
2. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong.

**Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong**



Gambar 1 Struktur Organisasi

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Didalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sorong, Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia ada 31 pegawai, adapun rincian pegawai per jenis kelamin dan golongan selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1 Pegawai Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Sorong Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat

Unit	Pria	Wanita	Gol.II	Gol.III	Gol.IV	Jumlah
Kepala	1	-	-	-	1	1
Sekretariat	1	7	-	7	1	8
Bidang Perindustrian	5	1	2	3	1	6
Bidang Perdagangan	4	3	1	5	1	7
Bidang Koperasi UKM	3	1	-	3	1	4
UPTD Metrologi Legal	1	2	-	3	-	3
UPTD Pasar Mariat	1	1	-	1	1	2

Adapun kondisi tingkat pendidikan per unit kerja di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Perindagkop UKM Kab. Sorong

Unit	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	Jumlah
Kepala	-	-	-	-	1	1
Sekretariat	-	5	-	2	1	8
Bidang Perindustrian	-	2	-	3	1	6
Bidang Perdagangan	-	1	1	5	-	7
Bidang Koperasi UKM	-	-	1	3	-	4
UPTD Metrologi Legal	-	-	-	3	-	3
UPTD Pasar Mariat	-	-	-	1	1	2

Berikut rekapitulasi SDM Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM berdasarkan kepangkatan

Tabel 3 Rekapitulasi Jenjang Kepangkatan

Unit	Eselon			Pelaksana	Fungsional	Jumlah
	II	III	IV			
Kepala	1	-	-	-	-	1
Sekretariat	-	1	-	7	-	8
Bidang Perindustrian	-	1	3	2	-	6
Bidang Perdagangan	-	1	2	4	-	7
Bidang Koperasi UKM	-	1	3	-	-	4
UPTD Metrologi Legal	-	-	1	2	-	3
UPTD Pasar Mariat	-	-	2	-	-	2

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong pada Renstra 2018 – 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel Kinerja Pelayanan Daerah Tahun 2018 - 2022

No	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase Usaha Baru	%	60	65	70	75	80	58	60	65	72,5	75					
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang berkembang	%	35	40	45	50	55	30	35	43	52	52					
3	Persentase Koperasi Sehat	%	22	24	26	28	30	20	22	25	28	30					
4	Persentase Pertumbuhan Aktifitas Perekonomian Masyarakat Bidang Industri dan Perdagangan	%	7	9	9	10	12	5	7	8	10	12					
5	Persentase aksesibilitas dan konektivitas perekonomian daerah melalui optimisasi Infrastruktur Pendukung Perekonomian	%	71,43	78,57	85,71	92,86	100	70	75,5	83,5	89,5	90					
6	Persentase Penambahan Infrastruktur Industri Kecil di Kabupaten Sorong	%	30	30	20	20	30	15	17	17	20	22					
7	Nilai SAKIP	Nilai	60	61	61	62	62	63	61	60	61	62					

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut merupakan Tantangan bagi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong

1. Belum adanya data akurat terkait Industri Kecil Menengah (IKM) maupun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
2. Keterbatasan SDM yang trampil dan profesional baik di Bidang Perindustrian, Perdagangan maupun Koperasi dan UKM;
3. Belum Optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana baik di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
4. Masih terjadi fluktuasi harga pada jenis komoditi tertentu yang cenderung tidak stabil;
5. Masih rendahnya kesadaran bagi pemilik UTTP yang tidak memenuhi standar untuk melakukan kalibrasi;
6. Ketidakseimbangan jumlah pertumbuhan usaha mikro dengan sumber daya yang ada;
7. Koperasi Aktif hanya 34% sedangkan 66% Koperasi tidak aktif dari total jumlah Koperasi sebanyak 157 Unit;
8. Perlunya pengembangan Inovasi disetiap bidang untuk mengatasi permasalahan IKM maupun UMKM terkait Legalitas, Pemasaran/Promosi dan IT.

Berikut merupakan Peluang bagi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong:

1. Tingginya komitmen dan dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk peningkatan, pemerataan perekonomian di wilayah timur khususnya Papua
2. Peluang investasi masih terbuka;
3. Dukungan Potensi sumber daya alam yang ada;
4. Pemekaran Provinsi Baru.

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong yaitu :

1. Perlunya Aparatur yang mempunyai Inovasi, Kualitas dan Kompetensi pada masing - masing bidang;
2. Masih adanya Sarana Prasarana yang belum optimal dimanfaatkan;
3. Belum ada database bagi IKM maupun UMKM yang dapat diandalkan;
4. Masih rendahnya pelayanan bagi pelaku usaha dalam mengatasi permasalahan Legalitas, Akses pasar, dan Informasi Teknologi;

3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dalam mewujudkan rencana pembangunan Kabupaten Sorong, maka tujuan dan sasaran merupakan perumusan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan Sasaran pelaksanaan pembangunan diuraikan sebagai berikut :

Tujuan dan Indikator Tujuan

1. Meningkatnya Mutu SDM Masyarakat Kabupaten Sorong
 - Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 - Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
 - Laju Pertumbuhan Ekonomi
 - Indeks Gini
3. Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur
 - Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
 - Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
5. Terwujudnya pembangunan dan pelayanan publik berkelas dunia
 - Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan 1 : Meningkatnya Mutu SDM Masyarakat Kabupaten Sorong

1. Terciptanya masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing
 - Indeks Kesehatan
 - Angka Harapan Hidup (AHH)
 - Angka Stunting
 - Prevelensi Malaria
 - Indeks Pendidikan
 - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
 - Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
 - Cakupan OAP penerima manfaat perlindungan afirmasi kontekstual Papua
2. Meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana
 - Indeks Risiko Bencana
3. Meningkatkan stabilitas wilayah dan Ketahanan masyarakat Kabupaten Sorong
 - Indeks Demokrasi Indonesia

Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

1. Meningkatnya perekonomian masyarakat
 - Tingkat Pengangguran Terbuka
 - Tingkat Inflasi Daerah
 - Angka Kemiskinan
 - Nilai Investasi
2. Meningkatnya pembangunan dan ketahanan pangan
 - Indeks Ketahanan Pangan
 - Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Tujuan 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur

1. Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pembangunan Infrastruktur Dasar
 - Indeks Infrastruktur
 - Tingkat Aksesibilitas antar wilayah (Indeks Alpha)
 - Tingkat Konektivitas antar wilayah

Tujuan 4 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

1. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pembangunan rendah karbon
 - Indeks Kualitas Udara (IKU)
 - Indeks Kualitas Air (IKA)
 - Indeks Kualitas Air Laut
 - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
 - Tingkat emisi GRK lahan dan kehutanan

Tujuan 5 :Terwujudnya pembangunan dan pelayanan publik berkelas dunia

1. Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
 - Indeks Reformasi Birokrasi
 - Innovation Government Award (IGA)

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk 4 tahun yang akan datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang mempengaruhi pembangunan daerah empat tahun mendatang adalah :

1. Adanya pemekaran provinsi menjadi Papua Barat Daya;
2. Peningkatan kualitas dan keterampilan SDM Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
3. Penyediaan data-data yang akurat tentang Industri, Pedagang, Koperasi dan UKM;
4. Optimalisasi sarana dan prasarana Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
5. Terwujudnya Pengamanan sektor perdagangan dan perlindungan terhadap konsumen.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM merupakan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Tujuan dan sasaran berdasarkan RPD 2023-2026 yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Koperasi, UKM sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal periode	Target Capaian Setiap Tahun (%)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
					2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Mutu SDM Masyarakat Kabupaten Sorong	Terwujudnya Pengendalian UMKM & Koperasi yang berkualitas	Persentase UMKM yang berstandarisasi		2	2,5	4	5	5
			Persentase Koperasi Sehat		10	13,5	15	18	18
2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Terwujudnya pengendalian di Sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persentase IKM yang menerapkan standarisasi		3	5	7	9	9
			Persentase Pertumbuhan Industri		13	15	17	19	19
		Meningkatnya pengendalian dan Pengamanan di Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan		16	17	18	19	19
			Persentase Pengaduan Konsumen terkait pengamanan perdagangan		75	80	81	83	83
3	Terwujudnya pembangunan dan pelayanan publik berkelas dunia	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Sesuai Dengan Prinsip <i>Good Governance</i>	Nilai AKIP OPD		64	65	67	68	68

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagaimana di rumuskan pada Bab sebelumnya dalam Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong ini terkait dengan pernyataan tujuan dan sasaran, maka disusunlah beberapa strategi dan kebijakan untuk pencapaiannya. Berdasarkan dari apa yang telah dirumuskan tersebut, maka ditentukan Strategi dan Kebijakan sebagaimana berikut :

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Mutu SDM Masyarakat Kabupaten Sorong	Terwujudnya Pengendalian UMKM & Koperasi yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kuantitas dan daya saing UMKM dan Koperasi melalui penguatan kapasitas dan ketrampilan SDM, serta pengembangan kemitraan usaha dengan usaha besar Meningkatkan Akses permodalan bagi UMKM Memfasilitasi Modal bagi pelaku UKM khusus OAP Menyelenggarakan pelatihan perkoperasian bagi anggota koperasi Melakukan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi Mengadakan pelatihan manajerial dan digitalisasi bagi pengelola koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan kualitas SDM Masyarakat yang berdaya saing
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Terwujudnya pengendalian di Sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Fasilitas sertifikasi dan standarisasi bagi pelaku IKM Meningkatkan keterampilan teknis bagi pelaku IKM Menerapkan teknologi industry Penguatan struktur industri 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan peran IKM dalam perekonomian masyarakat
	Meningkatnya pengendalian dan Pengamanan di Sektor Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan sarana distribusi perdagangan yang terpadu pada upaya tersedianya sarana dan prasarana perdagangan bagi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha Menstabilkan Harga Bahan Pokok dan Bahan Penting Meningkatkan perlindungan konsumen 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi hak – hak konsumen Meningkatkan pengelolaan pasar
Terwujudnya pembangunan dan pelayanan publik berkelas dunia	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Sesuai Dengan Prinsip <i>Good Governance</i>	Sinkronisasi program kegiatan sesuai kebutuhan tata kelola Pemerintahan sesuai dengan prinsip <i>Good Governance</i>	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan disusun mengacu pada Program yang tertuang dalam RPD Kabupaten Sorong Tahun 2023 - 2026, dengan uraian sebagai berikut:

Penjabaran Pelaksanaan Program:

A. Sekretariat

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

B. Bidang Koperasi dan UKM

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan;
2. Program Pengembangan UMKM
Program Pengembangan UMKM dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
3. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 5. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 6. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- C. Bidang Perindustrian
1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
 - 2) Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
- D. Bidang Perdagangan
1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - 2) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya;
 2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 3. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Tujuan RPD	Indikator Tujuan	Sasaran RPD	Indikator Sasaran	Sasaran Startegis	Indikator Sasaran	Data Capaian Awal Kinerja Perencanaan (%)	Target (%)				Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024									Tahun 2025		Tahun 2026								
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)							
Meningkatnya Mutu SDM Masyarakat Kabupaten Sorong	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Terciptanya masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing	Angka Stunting	Terwujudnya Pengendalian UMKM & Koperasi yang berkualitas	Persentase UMKM yang berstandarisasi		2	2,5	4	5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase pelaku usaha yang mendapat fasilitasi pendampingan, Kemitraan dan perizinan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		50 UKM	196.000	50 UKM	150.000	50 UKM	200.000	50 UKM	250.000		Bidang Koperasi dan UKM	
			Cakupan OAP penerima manfaat perlindungan afirmasi kontekstual Papua											Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang mendapat pendampingan pemanfaatan system aplikasi pembukuan keuangan		25 UKM	100.000	25 UKM	75.127	50 UKM	200.000	50 UKM	200.000		Bidang Koperasi dan UKM		
														Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Modal Usaha		851 UKM	4.000.000	850 UKM	2.000.000	850 UKM	2.000.000	850 UKM	2.000.000		Bidang Koperasi dan UKM		

															Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah wirausaha pemula menjadi wirausaha mapan		30 UKM	100.000		Bidang Koperasi dan UKM							
															Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		25 UKM	75.140	25 UKM	75.140	25 UKM	85.000	50 UKM	200.000		Bidang Koperasi dan UKM	
					Persentase Koperasi Sehat		10	13,5	15	18	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase tingkat pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengawasan bagi KSP dan USP	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		20 Koperasi	75.000	30 Koperasi	100.000	30 Koperasi	100.000	30 Koperasi	100.000		Bidang Koperasi dan UKM	
											Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang diberikan penilaian sehat	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		20 Koperasi	75.000	30 Koperasi	100.000	30 Koperasi	100.000	30 Koperasi	100.000		Bidang Koperasi dan UKM	

											Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelola Koperasi yang menerima pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	29 Orang		65 Orang	235.000	60 Orang	200.000	60 Orang	200.000			Bidang Koperasi dan UKM	
											Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	15 Koperasi	85.000	15 Koperasi	85.000	15 Koperasi	85.000	15 Koperasi	85.000				
															Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha Produktif Koperasi yang Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	15 Koperasi	85.000	15 Koperasi	85.000	15 Koperasi	85.000	15 Koperasi	85.000				

															Sosialisasi bagi kelompok masyarakat di wilayah adat untuk membentuk koperasi	Jumlah kelompok masyarakat prakoperasi di wilayah adat yang mendapatkan sosialisasi pembentukan koperasi		0	-	50 Orang	150.000	50 Orang	150.000	50 Orang	150.000			Bidang Koperasi dan UKM	
															Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya		0	-	10 Koperasi	150.000	10 Koperasi	150.000	10 Koperasi	150.000			Bidang Koperasi dan UKM	
															Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya		0	-	25 Koperasi	50.000	25 Koperasi	50.000	25 Koperasi	50.000			Bidang Koperasi dan UKM	
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya perekonomian masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	Terwujudnya pengendalian di Sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persentase IKM yang menerapkan standarisasi		3	5	7	9	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase perencanaan dan pembangunan industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase rencana pembangunan industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		0	-	1 Sentra	160.000	1 Sentra	160.000	1 Sentra	160.000			Bidang Perindustrian	

															Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri		0	0	2 Sentra	80.000	2 Sentra	80.000	2 Sentra	80.000			Bidang Perindustrian	
					Persentase Pertumbuhan Industri		13	15	17	19			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Perentase Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota Yang Diberikan		0	0	40 Paket	500.000	40 Paket	500.000	40 Paket	500.000			Bidang Perindustrian	
															Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota		0	0	80 IKM	650.000	80 IKM	650.000	80 IKM	650.000			Bidang Perindustrian	

															Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		1 Laporan	750.000	1 Laporan	500.000	1 Laporan	500.000	1 Laporan	500.000			Bidang Perdagangan, UPTD Pasar Mariat	
					Persentase Pengaduan Konsumen terkait pengamanan perdagangan		75	80	81	83	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase intervensi ketersediaan komoditas	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		12 Laporan	200.000	12 Laporan	150.000	12 Laporan	200.000	12 Laporan	200.000			Bidang Perdagangan, UPTD Pasar Mariat	
															Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		3 Laporan	2.000.000	3 Laporan	1.700.000	3 Laporan	2.000.000	3 Laporan	2.000.000			Bidang Perdagangan, UPTD Pasar Mariat	
											Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase pengaduan dan UTTP yang ditangani	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang ditera dan diawasi	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		300 Unit	150.000	600 Unit	250.000	700 Unit	300.000	700 Unit	300.000			UPTD Metrologi Legal	
															Pengawasan/Pe nyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		300 Unit	50.000	1000 Unit	100.000	1000 Unit	150.000	1000 Unit	150.000			UPTD Metrologi Legal	

Terwujudnya pembangunan dan pelayanan publik berkelas dunia	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing	Indeks RB dan Nilai IGA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Sesuai Dengan Prinsip Good Governance	Nilai AKIP OPD		64	65	67	68	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen penganggaran dan laporan kinerja	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersedia		1 Dokumen	5.000	1 Dokumen	5.000	1 Dokumen	5.000	1 Dokumen	5.000		Sekretariat	
															Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja OPD yang diselesaikan		3 Laporan	15.000	15 Laporan	32.000	15 Laporan	32.000	15 Laporan	32.000		Sekretariat	
												Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan		30 ASN	2.700.000	30 ASN	3.000.000	30 ASN	3.000.000	30 ASN	3.000.000		Sekretariat		
															Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun yang diselesaikan		1 Laporan	2.000	1 Laporan	2.000	1 Laporan	2.000	1 Laporan	2.000		Sekretariat	
												Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan perlengkapannya yang tersedia		40 Set	30.000	40 Set	30.000	40 Set	40.000	40 Set	40.000		Sekretariat		
															Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek		6 Orang	30.000	-	-	6 Orang	30.000	6 Orang	30.000		Sekretariat	
												Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik dan penerangan		1 Paket	5.000	1 Paket	5.000	1 Paket	7.000	1 Paket	7.000		Sekretariat		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan Unit Kerja. Indikator indikator yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sorong yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana pemabngunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026.

1. Urusan Perindustrian

- Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
Sasaran : Terwujudnya pengendalian di Sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM)

2. Urusan Perdagangan

- Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
Sasaran : Meningkatnya pengendalian dan Pengamanan di Sektor Perdagangan

3. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

- Tujuan : Meningkatnya Mutu SDM Masyarakat Kabupaten Sorong
Sasaran : Terwujudnya Pengendalian UMKM & Koperasi yang berkualitas

Indikator Sasaran dalam RPD tersebut kemudian menjadi Indikator Tujuan dalam Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong Tahun 2023 - 2026. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPD sebagaimana tersebut dalam Tabel di bawah ini :

Tabel Indikator Kinerja OPD Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi	Kondisi Kinerja Pada Awal periode	Target Capaian Setiap Tahun (%)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
						2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Mutu SDM Masyarakat Kabupaten Sorong	Terwujudnya Pengendalian UMKM & Koperasi yang berkualitas	Persentase UMKM yang berstandarisasi	$\frac{\text{Jumlah UMKM yang Berstandarisasi}}{\text{Jumlah UMKM}} \times 100\%$		2	2,5	4	5	5
			Persentase Koperasi Sehat	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang terklasifikasi}}{\text{Jumlah Total Koperasi}} \times 100\%$		10	13,5	15	18	18
2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Terwujudnya pengendalian di Sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persentase IKM yang menerapkan standarisasi	$\frac{\text{Jumlah IKM yang Tersertifikasi}}{\text{Jumlah IKM}} \times 100\%$		3	5	7	9	9
			Persentase Pertumbuhan Industri	$\frac{\text{Jumlah Industri Tahun N} - \text{Jumlah Industri Tahun (N-1)}}{\text{Jumlah Industri Tahun N}} \times 100\%$		13	15	17	19	19
		Meningkatnya pengendalian dan Pengamanan di Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	$\frac{\text{PDRB Sektor Perdagangan Thn N} - \text{PDRB Sektor Perdagangan Thn (N-1)}}{\text{PDRB Sektor Perdagangan Thn N}} \times 100\%$		16	17	18	19	19
			Persentase Pengaduan Konsumen terkait pengamanan perdagangan	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Konsumen yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan Konsumen}} \times 100\%$		75	80	81	83	83
3	Terwujudnya pembangunan dan pelayanan publik berkelas dunia	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Sesuai Dengan Prinsip <i>Good Governance</i>	Nilai AKIP OPD			64	65	67	68	68

VIII PENUTUP

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sorong Tahun 2023 - 2026 ini merupakan dokumen penjabaran RPD Kabupaten Sorong Tahun 2023 -2026 dan dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan dibidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong yang lebih terukur dan akuntabel.

Sasaran rencana strategis (Renstra) ini bersifat fleksibel karena sewaktu - waktu dapat berubah sesuai kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak. Sasaran tersebut meliputi sasaran Pemerintah Kabupaten Sorong dan juga merupakan sasaran kerja seluruh unit kerja lingkup Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong. Karena setiap unit kerja harus menjabarkan sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan yang layak dan dapat diterapkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang dikenal dengan Rencana Kinerja (Renja) Tahunan.

Monitoring dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sorong Tahun 2023 – 2026 tidak terlepas dengan pengukuran kinerja unit-unit di lingkup perangkat daerah yang menunjukkan sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan tertulis dengan memperhatikan prinsip-prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Evaluasi umum pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong Tahun 2023 – 2026 dilaksanakan pada akhir periode dan dibuat sebagai evaluasi resmi kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan Renstra tahun 2023 - 2026 sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan rencana strategis periode berikutnya.

Demikian dokumen rencana strategis ini dibuat namun tentu disadari sungguh bahwa dalam penyusunan rencana strategis ini masih memiliki

beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan sesuai perkembangan kebijakan pemerintah daerah.